



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2024**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP 2024 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Sinkronisasi, Tim Penulis, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi, dan Tim Administrasi.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Pengarah, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2024;
  - b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta memantau kesinambungan data dan alokasi proyek prioritas pada RKP, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA, dan RKA-KL;
  - c. melakukan supervisi atas kesinambungan/sinkronisasi antara indikator RPJMN 2020-2024 dengan RKP Tahun 2024, antara Pagu Indikatif/Anggaran dengan KRISNA serta RKA KL; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tim Sinkronisasi bertugas menjaga konsistensi substansi dan keselarasan antar Bab dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan menyusun rancangan pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
- KETUJUH : Tim Penulis bertugas:
- a. melaksanakan penulisan substansi Bab pada RKP (narasi dan matriks) termasuk Prioritas Nasional, Program Prioritas,

Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; dan

- b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

KEDELAPAN : Tim Koordinasi Proses Perencanaan terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Gubernur;
- b. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis;
- c. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat;
- d. Penanggung Jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi; dan
- e. Penanggung Jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.

KESEMBILAN : Tim Koordinasi Penyusun Substansi bertugas:

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.

KESEPULUH : Tim Administrasi bertugas mendukung proses penyelenggaraan *event* nasional terkait RKP Tahun 2024, rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, dan proses *legal drafting* dokumen RKP.

KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023.

KEDUABELAS : ...

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita Erawati', with a stylized flourish at the end.

RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2023  
TANGGAL 13 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2024

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Inspektur Utama.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan  
Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat dan Kebudayaan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum,  
Pertahanan dan Keamanan;  
2. Deputi Bidang Kependudukan dan  
Ketenagakerjaan;  
3. Deputi Bidang Ekonomi;  
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam;  
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional;  
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- D. TIM SINKRONISASI
- Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan  
Kewilayahan.
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Sosial dan  
Penanggulangan Kemiskinan;  
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;

3. Staf ...

3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
4. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
5. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA;
6. Dr. Ir. Chairil Abdini, Ph.D;
7. Kartika Yudhisti, B.Eng;
8. Ervan Maksum, ST, M.Sc;
9. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA.

E. TIM PENULIS

BAB 1: PENDAHULUAN

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

BAB 2: SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2.1. Evaluasi RKP 2021

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

2.2. Kerangka Ekonomi Makro

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.

Ketua Pelaksana : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

2.3. Strategi Pengembangan Wilayah

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.

Wakil ...

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Pembangunan Daerah.

### BAB 3: TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

#### 3.1. RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

#### 3.2. Tema, Sasaran, dan Sinergi Pembangunan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

#### 3.3. Prioritas Nasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

### BAB 4: PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

#### 4.1. Prioritas Nasional

4.1.1. Prioritas Nasional: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.

Ketua Pelaksana : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.

a. Program Prioritas: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

1) Kegiatan Prioritas: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

2) Kegiatan ...

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Pendukung EBT  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.
- b. Program Prioritas: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
- Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung  
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan  
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Air untuk Pertanian  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Air.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas  
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau  
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
  - 6) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Waduk Multiguna  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Air .

c. Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan

Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.

- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan

Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Kebutuhan Pokok

Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.

- 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar

Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.

- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian

Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.

- 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.

d. Program Prioritas: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

- 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

- 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta *Database* Kelautan dan Perikanan

Penanggung ...

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

e. Program Prioritas: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Penciptaan *Start-Up* dan Peluang Usaha

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

f. Program Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan *Non Agro* yang Terintegrasi Hulu-Hilir

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, termasuk melalui Pengembangan *Smelter* dan Kawasan Industri terutama di luar Jawa

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3) Kegiatan ...

- 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok  
Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital  
Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
  - 6) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Halal  
Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. Program Prioritas: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Impor  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

6) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

7) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

h. Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Penanggung Jawab : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan

Penanggung Jawab : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.

2) Kegiatan Prioritas: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5) Kegiatan Prioritas: Reformasi Fiskal

Penanggung Jawab : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.

6) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan ekonomi, terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital

Penanggung Jawab : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

4.1.1.1 Penanggung Jawab *Major Project* Prioritas Nasional 1

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi

a. MP Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas

Ketua Pelaksana : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b. MP Destinasi Pariwisata Prioritas

Ketua Pelaksana : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. MP Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*

Ketua Pelaksana : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

d. MP Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Ketua Pelaksana : Direktur Pangan dan Pertanian.

e. MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Ketua Pelaksana : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.

f. MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

Ketua Pelaksana : Direktur Kelautan dan Perikanan.

g. MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional

Ketua Pelaksana : Direktur Kelautan dan Perikanan.

h. MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

Ketua Pelaksana : Direktur Pangan dan Pertanian.

i. MP Pengelolaan Terpadu UMKM

Ketua Pelaksana : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

4.1.2. Prioritas Nasional: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

a. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Sumatera

Penanggung Jawab : Direktur Regional I.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi  
Penanggung Jawab : Direktur Regional II.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.
- b. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali  
Penanggung Jawab : Direktur Regional I.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis  
Penanggung Jawab : Direktur Regional III.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan  
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi  
Penanggung Jawab : Direktur Regional II.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.
- c. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara  
Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional II;  
2. Direktur Regional III.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis  
Penanggung Jawab : Direktur Regional III.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan  
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi  
Penanggung Jawab : Direktur Regional II.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

d. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Kalimantan

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

e. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Sulawesi

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

f. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Maluku

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

g. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Papua

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

4.1.2.1 Penanggung Jawab *Major Project* Prioritas Nasional 2

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional

a. MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

Ketua Pelaksana : Direktur Regional I.

b. MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar

Ketua Pelaksana : Direktur Pembangunan Daerah.

c. MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Ketua Pelaksana : Direktur Regional II.

d. MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

Ketua Pelaksana : Direktur Pembangunan Daerah.

e. MP Wilayah ...

e. MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Ketua Pelaksana : Direktur Regional III.

f. MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

g. MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara

Ketua Pelaksana : Direktur Regional II.

h. MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

4.1.3 Prioritas Nasional: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

Wakil Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Ketua Pelaksana : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

a. Program Prioritas: Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

1) Kegiatan Prioritas: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

2) Kegiatan Prioritas: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

3) Kegiatan Prioritas: Pendampingan dan Layanan Terpadu

Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4) Kegiatan Prioritas: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

b. Program Prioritas: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial

1) Kegiatan Prioritas: Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

- 2) Kegiatan Prioritas: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran  
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Perlindungan Sosial Adaptif  
Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Kesejahteraan Sosial  
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Program Prioritas: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan  
Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi  
Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat  
Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pengendalian Penyakit  
Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)  
Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan  
Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- d. Program Prioritas: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penanggung ...

- Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 4) Kegiatan Prioritas: Pejaminan Mutu Pendidikan  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- e. Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda  
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak  
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.
- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan  
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.
- 3) Kegiatan Prioritas: Kualitas Pemuda  
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.
- f. Program Prioritas: Pengentasan Kemiskinan  
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 1) Kegiatan Prioritas: Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga  
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Kegiatan Prioritas: Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial  
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Kegiatan Prioritas: Reforma Agraria  
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
- 4) Kegiatan Prioritas: Perhutanan Sosial  
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- g. Program Prioritas: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Penanggung ...

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagakerjaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagakerjaan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi

Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- 4) Kegiatan Prioritas: Prestasi Olahraga

Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

#### 4.1.3.1 Penanggung Jawab *Major Project* Prioritas Nasional 3

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

- a. MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

Ketua Pelaksana : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

- b. MP Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas)

Ketua Pelaksana : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- c. MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Ketua Pelaksana : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- d. MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Ketua Pelaksana : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- e. MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Ketua Pelaksana : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

#### 4.1.4. Prioritas Nasional: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

Ketua Pelaksana : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- a. Program Prioritas: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.

- 3) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter

Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

- 4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

- 5) Kegiatan Prioritas: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

- 6) Kegiatan Prioritas: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

- b. Program Prioritas: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Penanggung ...

- Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 3) Kegiatan Prioritas: Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 5) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- c. Program Prioritas: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan dikalangan Umat Beragama  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 3) Kegiatan Prioritas: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama  
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 5) Kegiatan ...

5) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

d. Program Prioritas: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Budaya Literasi

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta

Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

4.1.5. Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Ketua Pelaksana : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.

a. Program Prioritas: Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

1) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

2) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

3) Kegiatan ...

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Air.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Keselamatan dan Keamanan Transportasi  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Air.
  - 6) Kegiatan Prioritas: Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi  
Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Air.
- b. Program Prioritas: Infrastruktur Ekonomi  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 1) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Jalan  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Kereta Api  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Laut  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Udara  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Darat  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- c. Program Prioritas: Infrastruktur Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 1) Kegiatan Prioritas: Transportasi Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

d. Program ...

d. Program Prioritas: Energi dan Ketenagalistrikan

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

1) Kegiatan Prioritas: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

2) Kegiatan Prioritas: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

3) Kegiatan Prioritas: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

e. Program Prioritas: Transformasi Digital

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

1) Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

2) Kegiatan Prioritas: Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

3) Kegiatan Prioritas: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

4.1.5.1 Penanggung Jawab *Major Project* Prioritas Nasional 5

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

a. MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Ketua Pelaksana : Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

b. MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Ketua Pelaksana : Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

c. MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)

Ketua Pelaksana : Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

d. MP Pemulihan ...

d. MP Pemulihan 4 DAS Kritis

Ketua Pelaksana : Direktur Sumber Daya Air.

e. MP 18 Waduk Multiguna

Ketua Pelaksana : Direktur Sumber Daya Air.

f. MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Ketua Pelaksana : Direktur Sumber Daya Air.

g. MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

h. MP Kereta Api Makassar-Pare Pare

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

i. MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

j. MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

k. MP Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

l. MP Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

m. MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

n. MP Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

o. MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA

Ketua Pelaksana : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

p. MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

Ketua Pelaksana : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

q. MP Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

Ketua Pelaksana : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

r. MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak

Ketua ...

Ketua Pelaksana : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

s. MP Transformasi Digital

Ketua Pelaksana : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

4.1.6. Prioritas Nasional: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

Ketua Pelaksana : Direktur Lingkungan Hidup.

a. Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

1) Kegiatan Prioritas: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

2) Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

3) Kegiatan Prioritas: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

b. Program Prioritas: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

1) Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Bencana

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketahanan Iklim

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

c. Program Prioritas: Pembangunan Rendah Karbon

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

1) Kegiatan Prioritas: Pembangunan Energi Berkelanjutan

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.

2) Kegiatan ...

2) Kegiatan Prioritas: Pemulihan Lahan Berkelanjutan

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Limbah

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Hijau

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

5) Kegiatan Prioritas: Rendah Karbon Pesisir dan Laut

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

4.1.6.1 Penanggung Jawab *Major Project* Prioritas Nasional 6

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

a. MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Ketua Pelaksana : Direktur Lingkungan Hidup.

b. MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Ketua Pelaksana : Direktur Lingkungan Hidup.

4.1.7. Prioritas Nasional: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Ketua Pelaksana : Direktur Hukum dan Regulasi.

a. Program Prioritas: Konsolidasi Demokrasi

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

b. Program Prioritas: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c. Program Prioritas: Penegakan Hukum Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

1) Kegiatan Prioritas: Penataan Regulasi

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

2) Kegiatan Prioritas: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

3) Kegiatan Prioritas: Penguatan Sistem Anti Korupsi

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses terhadap Keadilan

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

d. Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.

1) Kegiatan Prioritas: Transformasi Manajemen SDM Aparatur

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.

2) Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.

3) Kegiatan Prioritas: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi

4) Kegiatan Prioritas: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.

e. Program Prioritas: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Keamanan Dalam Negeri

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

3) Kegiatan Prioritas: Keamanan Laut

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

5) Kegiatan Prioritas: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

4.1.7.1 Penanggung Jawab *Major Project* Prioritas Nasional 7

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

a. MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

Ketua Pelaksana : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

b. MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Ketua Pelaksana : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

4.2. Pendanaan Prioritas Nasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

BAB 5: KAIDAH PELAKSANAAN

5.1. Kerangka Kelembagaan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Ketua Pelaksana : Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi

5.2. Kerangka Regulasi

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Ketua Pelaksana : Direktur Hukum dan Regulasi.

### 5.3. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

### BAB 6: PENUTUP

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

#### Matriks Pembangunan Prioritas Nasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

#### Matriks *Major Project*

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

#### Daftar Proyek Prioritas

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

### F. TIM KOORDINASI PROSES PERENCANAAN

#### Bilateral/Trilateral/Multilateral *Meeting* tingkat Menteri

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Ketua Pelaksana *Major Project*

#### Rapat Koordinasi dengan Gubernur

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Regional III.

Wakil ...

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana III : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

#### Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Regional I.

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

Wakil Ketua Pelaksana III : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

#### Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN

Wakil Ketua Pelaksana III : Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional

#### Musrenbang Provinsi

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Pembangunan Daerah.

Wakil Ketua Pelaksana I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

#### Musrenbang Nasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Regional II.

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

G. TIM KOORDINASI PENYUSUN SUBSTANSI

Ketua Pelaksana	: Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana I	: Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor.
Wakil Ketua Pelaksana II	: Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
Wakil Ketua Pelaksana III	: Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana IV	: Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
Wakil Ketua Pelaksana V	: Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
Wakil Ketua Pelaksana VI	: Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
Wakil Ketua Pelaksana VII	: Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua Pelaksana VIII	: Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
Wakil Ketua Pelaksana IX	: Direktur Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua Pelaksana X	: Direktur Politik dan Komunikasi.
Wakil Ketua Pelaksana XI	: Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana XII	: Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
Wakil Ketua Pelaksana XIII	: Direktur Hukum dan Regulasi.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ir. Bambang Triyono;</li><li>2. Afwandi, SE;</li><li>3. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS;</li><li>4. Nuzula Anggeraini, S.STP, M.PS, M.URP;</li><li>5. Ladislaus Ryanniro Tumanggor ST;</li><li>6. Ultamas Eka Rahmawan ST;</li><li>7. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA;</li><li>8. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MIDEK;</li><li>9. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc;</li><li>10. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip;</li><li>11. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol;</li><li>12. Rufita Sri Hasanah, SE, M.IntEcon&amp;F;</li><li>13. Mohammad Agung Widodo, SP, MIDEK;</li></ol>

14. Diah Lenggogeni, ST, Msci;
15. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc;
16. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT;
17. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc;
18. Bahagiati Maghfiroh, S.Si;
19. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng;
20. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
21. Ricky Muhamad Ramdhan, SE, M.Sc;
22. Dimas Yudha Wicaksono, ST;
23. Edward Deming Sinaga, ST;
24. Mustaqim, ST;
25. Ersa Herwinda, S.Hut, M.Sc;
26. Irfan Darliazi Yananto, SE, M.Env.Rsc.Ec;
27. Asri Hadiyanti Giastuti, ST;
28. Caroline Aretha Merylla, ST;
29. Husni Rohman, S.IP;
30. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH;
31. Rezafaraby, SH, LLM;
32. Anantyo Wahyu Nugroho, S.E., M.Acc, Ak;
33. Firman Edison, S.Sos, ME;
34. Tri Wibowo, SE;
35. Afina Azizah, S.Si;
36. Annisa Chyntia Yusup, S.Stat;
37. Cindy Chelia, S.Mat;
38. Hasna Khaerunisa, S.Si;
39. Hendro Tri Utomo, S.Kom;
40. Nirwana Fatria Kridayati, S.Mat;
41. Vivi Nur Utami, S.Si;
42. Sugeng Wahyu Hendaro, ST;
43. Fajrul Irfan Ibrahim, SE.

H. TIM ADMINISTRASI

Ketua Pelaksana	: Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana I	: Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana II	: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua Pelaksana III	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsiapan dan Tata Usaha Pimpinan.
Wakil Ketua Pelaksana IV	: Kepala Biro Hukum.
Wakil Ketua Pelaksana V	: Kepala Biro Umum.
Wakil Ketua Pelaksana VI	: Kepala Pusat Analisis dan Kebijakan Kinerja.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rony Komala Winoto;</li><li>2. Asep Sukmayadi, ST, MT;</li><li>3. Suhartatik, ST, MM;</li><li>4. Mirza, S.Kom, MA, MPA;</li><li>5. Indra Wisaksono, SE, MPP;</li><li>6. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;</li><li>7. Sigit Santoso, S.Pd, M.Pd;</li><li>8. Eri Mulia, SE, ME;</li><li>9. Agus Sutarman SE, MAP, MIDS;</li><li>10. Budi Cahyono, S.Sos;</li><li>11. David Tinambunan, S.Sos;</li><li>12. Harjono;</li><li>13. Diah Triastuti;</li><li>14. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;</li><li>15. Syaiful Afif, SS, MPPM;</li><li>16. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M;</li><li>17. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw. Dev;</li><li>18. Nia Kurniati, SH;</li><li>19. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;</li><li>20. Nurpi, SE;</li><li>21. Wawan Setiawan;</li><li>22. Nanang Kurniawan;</li><li>23. Slamet;</li></ol>

24. Mat Soleh Siswanto;

25. Yunhri Trima Vibian, SE, MM;

26. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RR. Rita Erawati', written on a light-colored background.

RR. Rita Erawati